

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, 2015, *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Analisa*, Jakarta, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. dr. Moestopo Beragama.
- Anggriani, Jum, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Penerbit Universitas Tama Jagakarsa.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Mataram: Rajawali Pers.
- Calundu, Rasyidin, 2018, *Manajemen Kesehatan*, Makassar: CV. Sah Media.
- Eliana dan Sri Sumiati, 2016, *Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Fathur Rahman, 2018, *Teori Pemerintahan*, Jakarta: UB Press
- Handoyo, Eko, 2013, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya.
- Haboddin, Muhtar, 2015, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang: Universitas Brawijaya (UB Press).
- Hutami, Gartiria, 2016, *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. Jurnal Skripsi.
- Immanuel, Florentinus Christian. 2015, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*. ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 No2, hal.1185.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Kemenkes.
- , 2016, *Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci*, Jakarta, Kementerian kesehatan RI.
- , 2013, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I.
- Pancawati, Dewi, 2016, *Kenapa Mereka Masuk Peserta PBI, Kami Tidak?*, Kupang: Media Sosialisasi JKN.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mustafa, Zainuddin dan Maryadi, 2018, *Kepemimpinan Pelayanan (Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan)*, Jakarta, Celebes Media Perkasa, hal.36-37
- Nurmandi, Achmad, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta: PT. Sinergi Visi Utama.
- Putri, Asih Eka, 2016, Seri Buku Saku-4, *Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
- , 2016, *Paham JKN, Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- , 2014, *Seri Buku Saku-1: Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Ridwan, 2014 *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Rahman, Fathur, 2018, *Teori Pemerintahan*, Malang: Universitas Brawijaya (UB Press).
- Sadi, Muhammad Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Soerjowinoto, Petrus dkk, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Thabrany, Hasbullah, 2015, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Taufiqurrahman dan Evi Satispi, 2018, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, Tangerang: Penerbit UMM Press.
- Wowor, Hetmi dkk, 2016, *Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi XX (Januari- Februari 2016) Volume 3.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

Peraturan Bupati Karanganyar No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar No 45 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 440/2 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Internet

Siaran Pers BPJS Kesehatan, 2016, *Pentingnya Peran Pemda dalam Program JKN-KIS*. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>

<http://www.karanganyarkab.go.id/20170209/rakor-percepatan-program-jkn-kis-kabupaten-karanganyar-menuju-uhc-2019>

<http://www.jamkesnews.com>. 2018, Pemkab Karanganyar Targetkan Seluruh Warganya Terdaftar JKN-KIS.

<http://kelurahanmojogedang.blogspot.com/p/9-gallery-desa-mojogedang.html>

Dokumen Laporan Perkembangan Pendudukan dan Kepesertaan JKN-KIS Desa Mojogedang Tahun 2017, di Desa Mojogedang Tanggal 7 Agustus 2018.